

TAJUK RENCANA

Menyoal Sertifikat Mengemudi

POLRI bakal member-lakukan aturan tentang wajib menyertakan sertifikat mengemudi bagi para pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM). Bahkan, di beberapa daerah aturan ini sudah diberlakukan, antara lain di Polda Metro Jaya. Mereka yang hendak membuat SIM harus menyerahkan sertifikat mengemudi dari lembaga yang terakreditasi.

Kewajiban menyertakan sertifikat mengemudi ini tertuang dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Aturan ini, menurut Polri sebenarnya bukan hal baru karena sebelumnya sudah ada Perpol No 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM.

Banyak tanggapan kritis atas terbitnya aturan tersebut. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut aturan ini bisa melegalkan pungutan liar (pungli) dengan perantara pihak ketiga (KR 21/6). Padahal, sebenarnya secara substansi aturan tersebut bagus agar mereka yang mendapatkan SIM benar-benar mahir mengemudi. Kemahiran itu ditunjukkan dengan sertifikat mengemudi yang dikeluarkan lembaga yang terakreditasi.

Namun itu tentu dalam tataran ideal dan tidak sesuai dengan kenyataan. Tentu saja, secara kumulatif biaya untuk membuat SIM menjadi membengkak karena untuk mendapatkan sertifikat mengemudi tidak gratis. Pemohon SIM harus mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan tersebut. Biaya pembuatan SIM yang selama ini dikenal murah di Indonesia, menjadi tidak murah lagi karena ada biaya tambahan yang bersifat wajib.

Untuk itulah disarankan sebelum menarik biaya tambahan kepada masyarakat, se-

layaknya melalui mekanisme persetujuan dulu di DPR. Sebab, mengacu pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 1997, segala pungutan yang dibebankan kepada rakyat harus melalui persetujuan DPR.

Ini bukan berarti kita tidak setuju dengan penyertaan sertifikat mengemudi dalam permohonan pembuatan SIM, melainkan agar aturan tersebut tidak membebani rakyat dan bersih dari praktik curang. Sebagaimana disinyalir pengamat kepolisian Bambang Rukminto, aturan wajib sertifikat mengemudi rawan pungli. Jangankan ada aturan ini, tanpa aturan wajib sertifikat mengemudi pun masih bisa ditembus pungli, meski hal ini tak bisa digeneralisasi.

Sudah menjadi rahasia umum, para pemohon SIM, terutama pemilik kendaraan bermotor roda empat pribadi, lebih mudah memperoleh SIM melalui lembaga kursus latihan mengemudi, tentu dengan tambahan biaya. Inilah yang harus dicermati dan diwaspadai bila aturan wajib sertifikat mengemudi ini benar-benar diberlakukan.

Bayangan kita, lembaga kursus mengemudi akan bermunculan dan menjalin kemitraan dengan Polri untuk 'membantu' masyarakat mendapatkan SIM. Di sinilah sebenarnya potensi terjadinya pungli sebagaimana disinyalir pengamat kepolisian Bambang Rukminto.

Karenanya, bila wajib sertifikat mengemudi hendak diberlakukan, minta persetujuan DPR dan lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat benar-benar terakreditasi, bukan asal-asalan. Kita sangat ingat memahami, tujuan aturan sertifikat mengemudi sangat bagus, untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan sebagainya, namun prinsipnya jangan membebani rakyat. ❏d

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian PUPR akan melakukan penataan dan pembangunan fasilitas pendukung kawasan Candi Borobudur dalam waktu dekat ini. Beberapa di antaranya adalah penataan Kampung Seni Kujon sebagai tempat relokasi pedagang pasar di kawasan Candi Borobudur, pembangunan jalur pejalan, jembatan dan museum. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun tempat peribadatan umat Buddha di kawasan Candi Borobudur. Untuk melengkapi, Pemerintah Kabupaten Magelang akan menyiapkan lahan 8 hektare untuk tempat pembuangan akhir (TPA) yang menampung sampah dari kawasan Candi Borobudur.

Untuk proyek jalur pejalan dan penataan Kampung Seni Kujon direncanakan selesai tahun ini. Sementara museum akan mulai dikerjakan tahun ini dan diharapkan selesai tahun depan. Penataan dan pembangunan fasilitas pendukung ini dilakukan pemerintah karena Candi Borobudur merupakan destinasi wisata super prioritas. Candi Borobudur sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas yang telah ditetapkan oleh Kemenparekraf diharapkan memberikan kontribusi devisa negara dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Menjaga Keberlanjutan

Tidak hanya keberlanjutan ekonomi, pengelolaan Candi Borobudur juga diharapkan menjaga keberlanjutan sosial-budaya dan lingkungan. Tiga pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut harus menjadi 'nafas' bagi pengambil kebijakan dalam mengelola candi Buddha terbesar dunia tersebut. Tidak hanya aspek keberlanjutan, pemerintah juga harus menekankan pentingnya pelestarian Candi Borobudur. Pembangunan museum di kawasan Candi Borobudur diharapkan akan mengurangi jumlah wisatawan yang akan naik ke candi.

Sejumlah kerusakan candi baik batu candi yang mulai aus karena terinjak ju-

Fatkurrohman

taan kaki wisatawan, perilaku membuang sampah sembarangan, duduk di atas stupa dan vandalism merupakan fenomena yang harus dicegah. Maka diperlukan strategi untuk merawat eksistensi Candi Borobudur sebagai warisan dunia yang tercatat di UNESCO tahun 1991.



KR-JOKO SANTOSO

Pertama, proyek pembangunan museum. Bangunan museum ini diharapkan menjadi daya pikat bagi wisatawan untuk tidak harus naik ke bagian atas candi. Wisatawan cukup dengan melihat segala aspek Candi Borobudur baik sejarah, miniatur dan makna filosofis Candi Borobudur dapat dinikmati di museum. Maka desain museum harus dikemas secara artistik dan modern sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke museum. Jika museum dirancang secara konvensional seperti pada umumnya museum saat ini, tidak akan banyak wisatawan yang akan berkunjung.

Kedua, pariwisata berkualitas. Pariwisata jenis ini menekankan pada aspek jumlah wisatawan tidak terlalu

Buku Berkualitas, Masyarakat Cerdas

TULISAN di SKH Kedaulatan Rakyat beberapa waktu lalu (Analisis, 15/3) membahas salah satu episode kebijakan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kebijakan Merdeka Belajar tersebut diluncurkan per episode dengan tujuan untuk mempermudah pengukuran ketercapaian program transformasi pendidikan Indonesia. Adapun tujuan besar dari kebijakan tersebut ialah untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta memiliki profil pelajar Pancasila.

Salah satu kebijakan Merdeka Belajar yang patut menjadi perhatian, utamanya yang berkaitan dengan mutu bahan bacaan dan tingkat literasi ialah Merdeka Belajar Episode 23. Pada peluncuran episode Merdeka Belajar yang bertajuk 'Buku Bacaan Bermutu Untuk Literasi Indonesia' tersebut. Mendikbudristek, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa literasi sebaiknya dikemas dengan kegiatan yang menyenangkan agar anak-anak dan masyarakat lebih gemar untuk membaca.

'Kegembiraan Membaca'

Program peningkatan 'kegemaran membaca' sejatinya sudah banyak dilakukan, namun peningkatan 'kegembiraan membaca' seperti ini belum menjadi salah satu fokusnya. Padahal, kegembiraan membaca yang merupakan motivasi yang tumbuh dari dalam diri merupakan faktor yang mampu meningkatkan minat baca secara signifikan. Seseorang akan membaca dan menggali informasi secara sukarela dengan hal-hal yang ia minati, tanpa harus disuruh.

Data mengenai rendahnya minat baca masyarakat Indonesia sudah sering disebut. Beberapa yang populer dikutip antara lain: Riset World's Most Literate Nation pada 2016 yang menyatakan bahwa Indonesia peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Selanjutnya, pada 2018

Thoriq Tri Prabowo

hasil riset Program for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 10 terbawah dari 77 negara yang disurvei. Temuan riset UNESCO juga tidak kalah mencengangkan, yakni diketahui bahwa hanya terdapat satu dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca.

Apabila dielaborasi secara sederhana, saat ini setidaknya terdapat tiga tantangan yang perlu diselesaikan untuk mendorong performa literasi Indonesia. Pertama, rendahnya kualitas dan kuantitas bahan bacaan yang relevan dan sesuai dengan minat anak. Kedua, pendistribusian bahan bacaan berkualitas yang masih belum merata. Ketiga, minimnya jumlah serta kualitas SDM profesional yang fokus pada peningkatan mutu literasi.

Sebagai respons atas tiga persoalan di atas, kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan akhir Februari 2023 tersebut memiliki tiga pilar utama. Pertama, pemilihan dan penjenjangan bahan bacaan bermutu yang difokuskan pada minat dan kemampuan membaca anak. Kedua, pencetakan dan pendistribusian buku yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Terakhir, pelatihan serta pendampingan pengelolaan bahan bacaan kepada kepala sekolah, guru, dan pustakawan untuk mengelola bacaan dan mengorganisir kegiatan literasi yang lebih menyenangkan.

Mendistribusikan

Pada 2022 saja, Kemendikbudristek telah mendistribusikan lebih dari 15 juta eksamplar buku untuk ribuan PAUD dan SD.

banyak, tetapi tingkat belanja wisatawan tinggi. Model ini perlu diterapkan di Candi Borobudur agar kelestarian candi dapat terus terjaga. Candi Borobudur yang dibangun di abad ke-8 oleh Dinasti Syailendra ini sudah berumur ratusan tahun yang lalu. Ini artinya candi rentan mengalami kerusakan pendekatan pengelolaannya menggunakan *quantity tourism* yang menekankan banyaknya kunjungan wisatawan. Maka diperlukan *carrying capacity* (daya tampung). Untuk candi bagian atas 123 wisatawan, 528 wisatawan untuk halaman dan 10.308 wisatawan untuk taman candi.

Ketiga, balai ekonomi desa (balkondes). Balkondes yang dirintis Kementerian BUMN pada 2016 harus mampu memecah konsentrasi wisatawan naik ke atas Candi Borobudur. Maka balkondes harus gencar melakukan promosi dan penataan aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata di balkondes. Sehingga balkondes banyak dikunjungi wisatawan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Pelestarian Candi Borobudur tidak hanya melalui museum. Tetapi juga pentingnya penekanan pariwisata berkualitas dan promosi balkondes. Sehingga tidak hanya pelestarian yang diperoleh, tetapi juga pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kontribusi devisa negara juga dapat berjalan beriringan. ❏d

*) **Fatkurrohman MSi CHE, Dosen Prodi D4 Bisnis Perjalanan Wisata SV UGM, Mahasiswa S3 Kajian Pariwisata UGM dan Anggota ICMI Orwil DIY.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Meningkatkan Kewaspadaan dari Kasus TPPO

TINDAK pidana perdagangan orang (TPPO) itu sangat mengerikan. Jeratan yang mengikat sangatlah tidak terduga. Karena itu miris rasanya ketika mendengar di DIY bukan hanya korban yang anak-anak, namun juga pelakunya masih di bawah umur. Ini realita yang sungguh mengerikan.

Kita tidak perlu bertanya ada apa di DIY? Tapi mari kita lihat sekeliling kita juga. Karena fenomena tersebut sangat mungkin terjadi di sekeliling kita. Karena realita ini bukan hanya terjadi di DIY saja, tapi juga di kota atau di tempat lain. Hanya ketika terjadi di DIY, éledakan moralí seakan lebih menggema.

Dalam kasus ini tampaknya dirasakan bila kadang orang dewasa terlalu sibuk dengan kebutuhan dan persoalannya sehingga kurang peduli dengan apa yang dilakukan anak di bawah usia. Kadangkala juga menganggap aman anak bermain dengan yang seusianya. Nah apa yang terjadi sekarang perlu lebih meningkatkan kewaspadaan semua agar anak-anak terhindar dari hal-hal buruk.

Ini bukan persoalan ekonomi semata. Meski *iming-iming-guang yang mengajak hidup hedonis memang sangat menggoda.* ❏d

*) **Ayu Kusuma MPd, Gemah Pedurungan Semarang**

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ..Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP